

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya.

B. Buku

Adjie, Habib, 2009, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Surabaya.

Arto, Mukti, 2004. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Chazawi, Adami, 2018, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Rajawali Press, Depok.

Fajar Mukti, dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Harahap, Muhammad Yahya, 2010. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Nahak, Simon. *Hukum Pidana Perpajakan (Konsep Penal Policy Tindak Pidana Perpajakan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum)*, Setara Press, Jawa Timur.
- Manullang, E. Fernando M., 2007. *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta.
- Marsuni, Lauddin, 2006, *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudiknomor 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mustaqiem, 2014, *Perpajakan Dalam Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, Buku Litera Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mustofa, 2014, *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT*, Karya Media, Yogyakarta.
- Pohan, Chairil Anwar, 2017, *Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak Edisi 2*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, Cetakan kesatu, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Rochmat, Soemitro dan Dewi Kania Sugiharti, 2004, *Asas Dan Dasar Perpajakan Edisi Revisi*, Refika Aditama, Bandung.
- Rohim, 2010, *Modus Operandi Tindak Pidana Pajak*, Solusi Publishing, Jakarta.
- Thuronyi, Victor, Frans Vanistendael, 1996, *Tax Law Design and Drafting*. Vol. 1, "Drafting Tax International", International Monetary Fund, Washington D.C.-USA.

Sinamo, Nommensen, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, PT Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta.

Soemardjono, Maria S.W, 2019, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum Edisi Revisi*. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Sundarly, Erly. 2014, *Hukum Pajak Edisi 6*, Salemba Empat, Jakarta

Suparman, Eddy, Jaja Ahmad Jayus. *Penerapan dan Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Jakarta.

C. Jurnal/ Tesis/ Karya Ilmiah

Achmad, Ruben, 2018, “Aspek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perpajakan,” *Jurnal Ilmiah*, Vol 1 Nomor 2, Doctrinal, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang.

Dwipayana, Ade Krisna, 2020, “Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Hal Terbukti Turut Serta Tindak Pidana Korupsi.” *Tesis*, Universitas Gadjah Mada.

Lumbanbatu, Agustina Lusiana, 2011, “Analisis Hukum Atas Perbuatan Oknum Notaris Yang Menerima Penitipan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) (Studi Putusan PN Medan Nomor 2601/Pid.B/2003/PN.Mdn)”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara.

Hartati, Henny. 2018, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Notaris Pelaku Penggelapan Pajak Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor: 300/Pid.B/2015/PN. Dps),” *Jurnal Ilmiah*, Vol. 2 nomor 1, Al-Qanun, Universitas Padjadjaran, Bandung.

Mahmudah, Nurul, 2019. “Aspek Sosiologis dalam Putusan Pengadilan Pada Perkara Cerai Gugat”, *Nizham*, Vol. 07, Nomor 01.

Kurnia, Andi “Problematika Penerapan Prinsip Dominus Litis Dalam Perspektif kejaksaan”, *Artikel*, Kejaksaan Negeri Bone.

- Paramita, Rastri dan Martha Carolina. 2021, “Outlook Penerimaan Perpajakan Dan PNBPN 2021.”, *Karya Ilmiah*, Pusat Kajian Anggaran DPR RI, Jakarta.
- Sulardi, Yohana Puspitasari Wardoyo, 2015. “Kepastian Hukum, Kemanfaatan, dan Keadilan terhadap Perkara Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/Pn.BlT”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 8 Nomor 3.
- Sukmawati, Fanny Dewi, 2016, “Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan (Bphtb) Dalam Pengalihan Hak Atas Tanah Dan Atau Bangunan.” *Tesis*. Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya Malang.
- Warouw, Miranda Florence, 2018, “Pertanggungjawaban Notaris Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Akta (Studi Kasus Putusan Nomor 102/PID/2017/PT YYK Dan Putusan Nomor 185 PK/Pid/2010).” *Tesis*. Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada.
- Yustyawan, Gde Yogi dan Hariyanto Susilo, 2018. “Aspek Pertanggungjawaban Pidana Notaris Pada Pembuatan Akta Pihak (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1099/PID/2010)”, *IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Universitas Brawijaya.

D. Internet

- Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia,, <https://atpetsi.or.id/bukan-konsultan-pajak-boleh-jadi-kuasa-wajib-pajak>, diakses pada tanggal 16 Desember 2021.
- Bizlaw, “Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Solusi Pendaftaran Hak Atas Tanah”, <https://bizlaw.co.id>, diakses pada tanggal 9 November 2021.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 156/Pid.Sus-TPK/2015/Pn. Smg, diakses pada tanggal 26 April 2021.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 388 K/Pid.sus/2019, diakses pada tanggal 26 April 2021.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 2601/Pid.B/2003/PN.Mdn, diakses pada tanggal 01 Juni 2021.
- Orang Hebat Main Jujur, #Obat Manjur, 2020. Issue Discussion - PERMA nomor 1 Tahun 2020: sudah tepatkah?, *Youtube*, <https://www.youtube.com/watch?v=pbCH7tVWmkE>
- UB, Persada, 2020. Solusi Atau Masalah Mengatasi Disparitas Pidanaaan, *Youtube*, https://www.youtube.com/watch?v=i1Y_f4lpCME.

Pramesti, Tri Jata Ayu. *Arti Ultimum Remedium*, <http://www.hukumonline.com> , diakses tanggal 20 Oktober 2021.

_____. *Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, <http://www.hukumonline.com> , diakses tanggal 21 Oktober 2021.